

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 15 Februari 2017, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap II digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah yang ikut menggelar Pilkada serentak ini untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022. Sekitar 69,75% dari 779.379 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan total suara sebesar 544.860 terdiri dari 525.371 suara sah dan 19.597 suara tidak sah. Pasangan Budhi Sarwono dan H. Syamsudin unggul dengan perolehan suara sebesar 54,21%. Jumlah suara tersebut mengungguli dua pasangan calon lainnya yaitu pasangan Hadi Supeno dan Nur Heni serta pasangan Wahyu Kristanto dan Saeful Muzad.

Tabel 1.1
Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2011 dan 2017

| Tahun | Indikator | Laki-laki | Perempuan | Total |
|--|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 2011 | Pemilih dalam DPT | 376194 | 369375 | 745569 |
| | Pengguna Hak Pilih | 244371 | 270540 | 514911 |
| 2017 | Pemilih dalam DPT | 394420 | 388388 | 782808 |
| | Pengguna Hak Pilih | 257453 | 288566 | 546019 |
| Total Presentase Kenaikan Pengguna Hak Pilih | | 0,35% | 0,76% | 0,69% |

Sumber: KPU Banjarnegara, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak terjadi kenaikan tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) yang signifikan. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 telah mencapai angka 69,75%. Namun, apabila dibandingkan dengan presentase partisipasi pemilih masyarakat di Kabupaten Banjarnegara pada Pilkada tahun 2011 maka kenaikan tingkat partisipasi pemilih masyarakat tidak mencapai angka satu persen. Padahal tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) kerap kali dianggap sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum secara umum.

Pada dasarnya *voter turnout* merujuk pada sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Tingkat kehadiran pemilih pada hari pemilihan nantinya akan menunjukkan presentase terkait partisipasi pemilih pada sebuah pemilu. Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pemilu dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat akan langsung bersinggungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaulat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu ataupun panggung politik maka menunjukkan hubungan positif antara masyarakat dengan pemerintah.

Kenaikan tingkat partisipasi pemilih masyarakat yang rendah menjadi evaluasi bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan Pemilu. Lembaga yang dibentuk pada tahun 1999 ini diharapkan nantinya dapat menyelenggarakan Pemilu dengan objektif, kredibel dan adil. Selain itu KPU diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan Pemilu. KPU perlu membuat strategi-strategi baru dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat secara signifikan.

Partisipasi pemilih berkaitan dengan kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Partisipasi pemilih menjadi salah satu faktor penting yang perlu terus ditingkatkan dalam setiap pelaksanaan pemerintahan termasuk Pemilu, selain itu partisipasi pemilih juga erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Hal ini dikarenakan kerangka hubungan antara partisipasi pemilih, demokrasi dan legitimasi sangat erat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi pemilih sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Oleh sebab itu partisipasi pemilih menjadi salah satu aspek penting dari tatanan negara demokrasi, sekaligus sebagai ciri khas adanya modernisasi politik.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk terlibat langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu terjaminnya peran masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Pengertian demokrasi sebenarnya begitu beragam namun tetap merujuk pada keterlibatan masyarakat atau mayoritas dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut Sidney Hook (1980), demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang didasari oleh keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa pada setiap pengambilan keputusan-keputusan penting pemerintah maupun arah kebijakan. Dengan kata lain dalam negara demokrasi masyarakat dapat menilai bahkan berperan serta dalam setiap pengambilan keputusan maupun arah kebijakan yang nantinya juga akan mempengaruhi arah hidup mereka.

Negara demokrasi pada pelaksanaannya dijalankan melalui beberapa prinsip. Menurut Carter dan Herz (1982) terdapat tujuh prinsip dari negara demokrasi. Pertama, adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah melalui pergantian pemimpin secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Kedua, adanya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Ketiga, adanya keadilan dan persamaan di depan hukum tanpa membedakan kedudukan politik. Keempat, adanya pelaksanaan pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif. Kelima, diberikannya hak kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi masyarakat, bahkan individu serta kebebasan berpendapat melalui pers dan media masa. Keenam, kebebasan menyatakan arah pandangan. Ketujuh, diberakukannya sikap mengahragai hak-hak minoritas dan perorangan melalui penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Salah satu penerapan prinsip demokrasi di Indonesia adalah dilaksanakannya Pemilu, sebagai ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin serta perwakilannya di parlemen selama lima tahun kedepan. Pemilu bahkan diakui sebagai arena pembentuk demokratisasi perwakilan dalam upaya pergantian pemerintahan secara berkala. Selain itu Pemilu juga

membuka kesempatan bagi partai oposisi dan rakyat untuk melaksanakan mekanisme *check and balances* terhadap partai yang berkuasa. Pemilu menjadi sebuah mekanisme universal dalam pelaksanaan sistem politik di negara-negara demokratis dan terlembagakan secara institusional.

Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dengan periode pelaksanaan setiap lima tahun sekali. Pada pelaksanaannya Pemilu di Indonesia terus berkembang dan mengalami pergeseran secara signifikan. Hal ini dikarenakan Pemilu merupakan bentuk nyata dari pengimplementasian asas demokrasi di Indonesia. Pemilu kerap kali menjadi pusat perhatian utama dalam upaya perwujudan pemerintahan yang demokratis. Selain itu Pemilu juga merupakan perwujudan paling konkret terkait partisipasi masyarakat karena melalui Pemilu masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan penyelenggaraan negara.

Setiap warga negara berhak berpartisipasi serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengevaluasi maupun memilih pemimpinnya di masa depan. Melalui pelaksanaan Pemilu inilah masyarakat dapat menyalurkan suaranya untuk menentukan arah serta pemimpin di masa depan. Secara tidak langsung hal ini memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Keberhasilan suatu Pemilu bahkan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Pentingnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu nyatanya sering tidak sejalan dengan yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia kerap kali diwarnai dengan berbagai masalah partisipasi pemilih masyarakat khususnya pada tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilu (*voter turnout*). Masalah ini tidak terjadi satu dua kali namun, sering terjadi dalam pentas pemilihan di Indonesia baik pemilihan Presiden, Kepala Daerah hingga anggota parlemen. Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya terjadi karena kendala teknis atau pekerjaan

sehingga membuat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena masalah administratif, sosialisasi atau aspek politik pemilih. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu inilah yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Peningkatan angka partisipasi pemilih masyarakat pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Hal ini karena tingkat partisipasi politik masyarakat nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Pemilu. Dalam pelaksanaannya tingkat partisipasi pemilih masyarakat di Indonesia cenderung naik turun. Banyak daerah di Indonesia yang menemui permasalahan menurunnya partisipasi politik masyarakat, namun tidak sedikit juga yang partisipasi politik masyarakatnya naik secara signifikan. Hal ini sesuai dengan kebijakan serta strategi KPU Kabupaten/Kota serta kesadaran masyarakat daerah bersangkutan. Berdasarkan data partisipasi pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Banjarnegara dapat dikategorikan sebagai daerah yang partisipasi pemilihnya naik. Namun, kenaikan partisipasi politik masyarakatnya sangat rendah bahkan tidak mencapai angka satu persen.

Kenaikan partisipasi pemilih masyarakat yang cenderung rendah di Kabupaten Banjarnegara membuat KPU harus mengkaji ulang strategi yang telah dijalankan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi pemilih di Kabupaten Banjarnegara nyatanya hanya naik sebesar kurang dari satu persen dari Pilkada sebelumnya menjadi 69,75%. Meskipun tingkat partisipasi politik di Kabupaten Banjarnegara telah mencapai angka 69,75%, hal ini dirasa masih kurang karena tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh KPU Pusat yaitu sebesar 77,5%. Dengan demikian, strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum optimal sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait evaluasi strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 dan alasan mengapa tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) di Kabupaten Banjarnegara masih cenderung rendah. Sehingga dibuatlah penelitian yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017?
2. Mengapa tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) di Kabupaten Banjarnegara masih cenderung rendah pada Pilkada Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.
2. Untuk menganalisis alasan mengapa tingkat partisipasi pemilih (*voter turnout*) di Kabupaten Banjarnegara masih cenderung rendah pada Pilkada Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat di Indonesia. Khususnya strategi-strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilu dan Pilkada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah maupun peneliti lain dalam merumuskan serta

menentukan strategi-strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi KPU Kabupaten Banjarnegara.

1.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini menggunakan sumber data dari lapangan dan menggunakan beberapa sumber pustaka sebagai acuan pembandingan serta penguatan teori. Menurut tinjauan peneliti, penelitian yang menjelaskan secara khusus tentang “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017”. Namun penelitian terkait strategi Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi serta evaluasi strategi telah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nopi Amalia dan Andi Mulyadi yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini berfokus pada strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang diukur melalui pengurangan angka golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota Sukabumi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sudah terwujud dan dapat dikatakan berhasil. Hal ini dilihat dari data presentase pemilih golput yang menurun dari pemilihan sebelumnya sebanyak 15%. Angka golput di Kota Sukabumi berhasil ditekan melalui strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizma Dwi Nidia dan Andina Elok Putri Maharani dengan judul Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Surakarta. Penelitian ini berfokus pada implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait peran Komisi Pemilihan Umum dalam upaya peningkatan partisipasi

masyarakat pada pemilihan umum legislatif. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dipilih oleh KPU Kota Surakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Paul Adriyani Moento, Fitriani dan Albertus Yosep Maturan dengan judul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini membahas terkait strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Merauke melalui sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Merauke menargetkan para pemilih pemula dan bekerja sama dengan media serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi terkait tata tertib hingga cara memilih bagi pemilih pemula. Selain itu KPU Kota Merauke juga melakukan koordinasi dengan partai politik agar dapat ikut berpartisipasi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa dan Ari Ganjar Herdiansah yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada analisis serta pendeskripsian strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) dalam konteks pelaksanaan pemilu. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi berupa sosialisasi yang dilakukan secara masif, merata dan menjangkau berbagai elemen masyarakat. Selain itu strategi sosialisasi juga terbagi menjadi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi-strategi tersebut mengantarkan KPU Kota Bekasi pada keberhasilan dengan meningkatnya partisipasi pemilih secara masif meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Petrus Gleko, Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari yang berjudul Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini berfokus pada strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan menggunakan purposive sampling dalam penarikan sampelnya. Upaya peningkatan partisipasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang terbagi menjadi tiga tahap yaitu tahap formulasi, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya. Selain itu pada dasarnya terdapat kendala yang terjadi seperti minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat serta jumlah personil yang terbatas.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa fokus utama penelitian sebelumnya lebih menekankan pada strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada fokus utama pembahasan mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian saat ini sekaligus sebagai penguat penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai partisipasi pemilih serta evaluasi strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Konsep Strategi

Strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan sebagai landasan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Chandler (1962) strategi merujuk pada alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas sumber daya. Dengan kata lain, strategi disini tidak hanya sebagai sebuah jalan untuk mencapai tujuan namun juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi pada lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut Marrus (2002:31) strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang dibuat para pemimpin puncak yang difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai dengan upaya-upaya atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dapat dikatakan strategi sebagai suatu

cara atau metode yang dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang terstruktur dan terarah. Strategi sendiri merupakan fungsi dasar dari manajemen organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan langkah organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Gregory G. Dess dan Alex Miller (1993), strategi terbagi menjadi dua bentuk. Pertama dapat disebut sebagai strategi yang dikehendaki dan yang kedua disebut strategi yang direalisasikan.

a. Strategi yang dikehendaki (*intended strategic*), strategi ini pada dasarnya terdiri dari tiga elemen, yaitu sasaran-sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana-rencana (*plans*).

1) Sasaran-sasaran (*goals*) merupakan sesuatu yang ingin atau hendak diraih oleh organisasi atau perusahaan. Sasaran sendiri mempunyai arti luas dan sempit. Arti luas lebih mengarah pada tujuan utama yang ingin diraih seperti seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Hal itu dapat dikatakan sebagai sasaran dalam arti luas. Sedangkan sasaran dalam arti sempit lebih mengarah ke bagaimana dan apa saja upaya yang diperlukan untuk mencapainya. Contohnya dalam upaya mencapai kebahagiaan setiap individu memerlukan usaha, waktu serta sumberdaya. Hal inilah yang disebut sasaran dalam arti sempit. Selanjutnya dalam sasaran tersebut terbentuk sebuah hierarki atau tingkatan dari sasaran yang ditentukan. Gregory G. Dess (dalam Saladin, 2003) membagi hierarki atau tingkatan dari sasaran tersebut menjadi: 1) visi (*vision*) yaitu apa yang akan dilakukan organisasi atau perusahaan. Visi merupakan kerangka acuan dan perspektif sebagai suatu kesatuan yang tercermin dalam kegiatan nyata, 2) misi (*mission*) yaitu

banyaknya batasan sasaran yang akan dicapai. Misi merupakan tugas dan prinsip pokok dalam mewujudkan visi, 3) tujuan-tujuan (*objectives*) yaitu tujuan yang lebih spesifik terhadap sesuatu yang hendak dicapai.

- 2) Kebijakan (*policies*) merupakan garis pedoman untuk bertindak. Kebijakan nantinya akan menjadi jalan penuntun bagaimana sebuah organisasi mencapai sasaran-sasaran yang telah dibuat sebelumnya.
- 3) Rencana-rencana (*plans*) merupakan sebuah tindakan dari seorang manajer organisasi dalam bentuk pernyataan terhadap apa yang akan terjadi nantinya (Amalia, 2019:3).

- b. Strategi yang direalisasikan (*realized strategic*), merupakan apa yang telah dicapai atau telah direalisasikan oleh organisasi atau perusahaan.

Perumusan strategi pada dasarnya perlu melalui beberapa tahap. Tahapan ini dimulai dengan formulasi strategi kemudian implementasi strategi dan diakhiri dengan evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi ini disebut dengan proses manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Wheleen dan Hunger (dalam Umar, 2010:16) merujuk pada serangkaian keputusan serta tindakan manajerial jangka panjang yang akan menentukan kinerja perusahaan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, evaluasi dan pengendalian. Sedangkan menurut Heene, dkk (2010:76) manajemen strategi merupakan suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan serta mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi organisasi serta berfokus pada pemvisualisasian atau penerapannya terkait agenda strategik dari organisasi tersebut. Manajemen strategi bertujuan untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan semua proses manajemen yang bertujuan untuk

mengembangkan diri melalui pendekatan yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan organisasi yang kemudian di terapkan, dipantau dan dievaluasi.

Menurut Dirgantoro (2001:94) proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap yaitu:

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi mencakup pada kegiatan pengembangan visi misi, indentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menemukan kekuatan serta kelemahan internal organsasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan strategi alternatif untuk organisasi serta memilih strategi yang akan digunakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses strategi. Pada pelaksanaan proses implemetasi strategi harus dibarengi dengan pemantauandemi tercapainya tujuan organisasi. Selain itu organisasi diharuskan untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, motivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang sistematis dan efektif, pegalokasian sumber daya, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Pelaksanaan strategi ini kerap kali disebut dengan tahap tindakan dalam manajemen strategi. Tahap ini dinilai sebagai tahap paling sulit karena menuntut kedisiplinan, komitmen serta pengorbanan pribadi.

Implementasi strategi menurut Amir (2011:192) merupakan serangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Hal ini berarti implementasi strategi merupakan tahap pengeksekusian segala rumusan terkait strategi dan kebijakan yang kemudian diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Tahap ini dikatakan sangat penting karena rumusan strategi yang tidak diimplementasikan akan menciptakan sebuah hal yang tidak ada artinya. Selain itu perumusan strategi dan implementasi strategi harus sesuai dengan tujuan serta misi strategis yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal. Sehingga nantinya implementasi strategi dapat berjalan maksimal.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap terakhir dari manajemen strategi. Pada tahap ini diperlukan analisis mendalam terkait alasan strategi-strategi yang dirumuskan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Melalui tahap evaluasi strategi ini informasi terkait pengimplementasian strategi diperoleh. Selanjutnya, terdapat tiga hal pokok dalam evaluasi. Pertama, pengkajian ulang terkait faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang ditetapkan. Kedua, mengukur tingkat kinerja yang telah dilaksanakan. Ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif terkait implementasi strategi.

Sebagai tahap akhir dari proses manajemen strategi, evaluasi strategi digunakan untuk memperoleh langkah yang lebih efisien dari strategi sebelumnya yang tidak bekerja dengan baik. Hasil dari proses ini nantinya akan menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Penilaian pada evaluasi strategi ini didasarkan

pada pengukuran faktor-faktor serta indikator yang sukses dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi sebelumnya guna merumuskan dan menerapkan strategi lanjutan dimasa depan agar lebih baik dan efektif. Menurut David (2005:308) terdapat tiga kegiatan dasar dalam mengevaluasi strategi, yaitu:

- 1) Memeriksa dasar yang mendasari strategi perusahaan;
- 2) Membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual atau pengimplementasian;
- 3) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan rencana yang dirumuskan.

Tahap evaluasi strategi merupakan tahap penting lainnya dalam manajemen strategi. Hal ini dikarenakan lingkungan yang ada selalu berubah secara dinamis dimana faktor internal dan eksternal dapat berubah dengan cepat dan drastis. Selain itu tahap evaluasi strategi ini juga dapat menjadi cara untuk mengetahui dan memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Strategi dalam organisasi atau manajemen pada dasarnya terbagi menjadi beberapa tipe. Menurut Koteen (1991) tipe-tipe strategi terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Corporaty Strategy*. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategik yang baru. pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu, apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy*. Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan bagaimana pula dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Support Strategy*. strategi pendukung sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan

pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan lain sebagainya.

- d. *Institutional Strategy*. Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif inisiatif strategik.

1.6.2. Konsep Voter Turnout

Voter turnout pada dasarnya merujuk pada sejauh mana pemilih yang memenuhi syarat menggunakan suara mereka dihari pemilihan, yang mana nantinya akan diukur sebagai presentase suara yang diberikan pada suatu pemilihan termasuk suara tidak sah (Blais, A. dkk., 2011). Bentuk partisipasi pemilih ini lebih merujuk pada tingkat kehadiran pemilih di bilik suara (partisipasi konvensional). Hal inilah yang membuat tingkat kehadiran pemilih (*voter turnout*) menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tingkat kehadiran pemilih pada pemilu kerap kali menjadi acuan tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilu, sehingga dalam hal ini tingkat kehadiran pemilih pada bilik suara (*voter turnout*) sangat penting.

Voter turnout merupakan salah satu bentuk dari partisipasi pemilih konvensional yang merupakan partisipasi paling umum dilakukan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson partisipasi pemilih merujuk pada kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, dikarenakan partisipasi dapat bersifat individual maupun kolektif, terorganisir maupun spontan, mantap maupun sporadic, secara damai maupun dengan kekerasan, legal maupun tidak legal serta efektif maupun tidak efektif (dalam Miriam Budiarjo, 2008:368). Sedangkan Menurut Michael Rush dan Philip (1990) partisipasi politik mengarah pada kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dengan ikut

serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Partisipasi pemilih mencakup segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk ikut serta dalam Pemilihan Umum.

Partisipasi pemilih secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu partisipasi *electoral* dan *non electoral*. Kemudian partisipasi *electoral* dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu konvensional, yang merujuk pada tingkat kehadiran pemilih di balik suara (*voter turnout*) sementara non-konvensional, rujukannya jauh lebih luas seperti keterlibatan masyarakat pada proses-proses pemilu yaitu kampanye hingga menjadi relawan. Sedangkan partisipasi *non-electoral* memiliki bentuk yang sangat luas dimana dalam partisipasi ini keterlibatan masyarakat tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan pemilu. partisipasi politik *non-electoral* biasanya merujuk pada kontroversi politik seperti gerakan sosial, boikot, protes, dan lain-lain (Nurhasim, 2014; Surbakti, 1992).

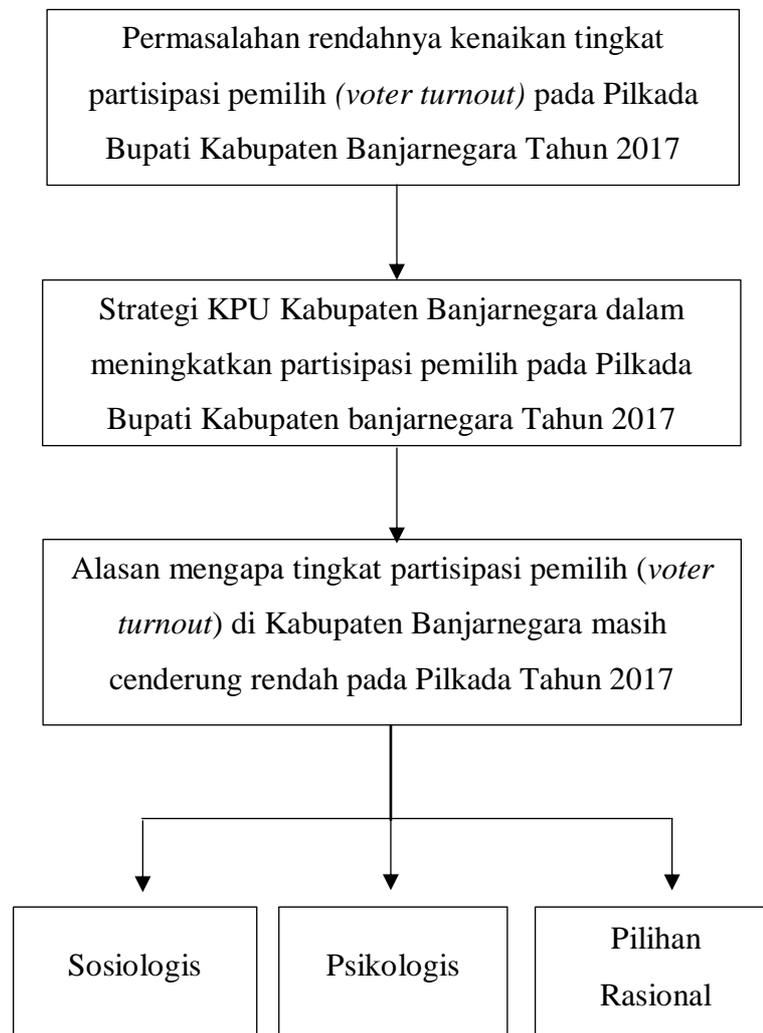
Bentuk partisipasi politik sangat beragam dan dibedakan dalam bentuk konvensional dan non-konvensional. Salah satu bentuk partisipasi pemilih paling umum adalah ikut serta dan hadir dalam Pemilihan Umum (*voter turnout*) yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang (partisipasi konvensional). Selain itu bentuk partisipasi konvensional juga dapat berupa diskusi politik hingga kegiatan kampanye. Sedangkan partisipasi non-konvensional memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak berfokus pada kegiatan pemilu. Seperti pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi hingga tindak kekerasan politik terhadap manusia seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya hingga revolusi.

Voter turnout merupakan bentuk dari partisipasi pemilih yang pada dasarnya di pengaruhi oleh berbagai faktor. Ramlan Surbakti (2005:140) berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi

pemilih setiap individu. Faktor pertama adalah aspek kesadaran politik terhadap pemerintah yang berdaulat (sistem politik). Sedangkan faktor kedua lebih merujuk pada penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah serta pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini juga dapat merujuk pada kepercayaan warga negara terhadap pemerintah yang berdaulat, baik dari kebijakan hingga pemerintahannya. Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor yang berdiri sendiri atau dapat diartikan sebagai faktor yang rendah kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor ini meliputi status sosial, status ekonomi, afiliasi politik orang tua serta pengalaman berorganisasi.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan kehadiran pemilih dan ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Pendekatan pertama lebih menekankan pada karakteristik sosial atau sosiologis dan psikologis pemilih serta karakteristik institutional sistem pemilu yang ada. Sedangkan pendekatan kedua lebih menekankan pada harapan pemilih atas keuntungan maupun kerugian yang akan mereka dapat apabila datang atau tidak datang ke bilik suara untuk memilih (Nurhasim, 2014). Sehingga pada dasarnya voter turnout dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

1.7 Kerangka Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1. Strategi

Strategi merupakan fungsi dasar dari manajemen organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan langkah organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagai suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan tertentu yang terstruktur dan terarah.

Menurut Beaudan (dalam Henne 2010:186) terdapat tiga indikator keberhasilan strategi. *Pertama*, kejelasan persepsi dimana strategi harus diperjelas maknanya agar dapat dipahami bersama sehingga setiap individu dapat

mengintepretasikan strategi dengan pemahaman yang sama. *Kedua*, keterkaitan kolektif yaitu keterkaitan antara strategi dengan partisipan yang nantinya akan menciptakan sebuah keyakinan bagi para partisipan untuk mengimplemetasikan strategi tersebut. *Terakhir*, keteguhan tekad dimana dalam pengimplementasian sebuah strategi perlu adanya fleksibilitas dari semua anggota.

1.8.2. Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*)

Voter turnout pada dasarnya merupakan tingkat partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan yang nantinya akan diukur sebagai presentase suara yang diberikan pada suatu pemilihan termasuk suara tidak sah.

Pada dasarnya terdapat tiga indikator yang mempengaruhi hadir atau tidaknya pemilih ke tempat pemungutan suara. *Pertama*, faktor sosiologis atau karakteristik sosial. *Kedua*, faktor psikologis pemilih. *Ketiga*, pilihan rasional dimana merupakan harapan pemilih atas keuntungan maupun kerugian yang akan mereka dapat apabila datang atau tidak datang ke bilik suara untuk memilih.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan metode kualitatif akan lebih mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Instrumen pengumpulan data akan dilakukan dengan melalui wawancara langsung dan dokumentasi.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana dalam model penelitian deskriptif lebih

mengutamakan penjelasan kata-kata dan gambar. Penggunaan metode penelitian deskriptif bertujuan untuk dapat menganalisis data yang ada seakurat mungkin hingga mendekati kondisi aslinya agar nantinya data yang dihasilkan dapat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana data-data penelitian didapatkan, baik berupa data primer maupun data sekunder saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, subjek penelitian yang akan dibahas adalah mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.

1.9.4. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang didasarkan dari hasil memperolehnya.

1.9.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari informan maupun narasumber. Selain itu data primer dapat didapatkan melalui observasi hasil pengamatan yang dilakukan terhadap objek tertentu mengenai fenomena atau masalah tertentu. Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan informan yang berasal dari struktural organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, serta observasi dengan terjun langsung untuk mengamati langsung kinerja serta mendapatkan data langsung dari anggota KPU Kabupaten Banjarnegara.

1.9.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui membaca, mempelajari serta memahami melalui media lain yang bersumber pada buku, literatur, dan dokumen. Data sekunder dijadikan sebagai data pendukung informasi data primer. Pada penelitian ini data sekunder berasal dari buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan evaluasi strategi, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, pemilu serta peraturan pemerintah.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kali ini adalah dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data campuran.

1.9.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan melalui komunikasi antara peneliti dengan narasumber untuk saling bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi narasumber untuk menanyakan pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis berencana untuk melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.9.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data-data dengan barang tertulis yang sudah ada sebelumnya, berasal dari sumber catatan-catatan literatur, pesan, gambar, diari, hasil penemuan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih luas serta tidak terbatas ruang dan waktu sehingga penulis dapat

mengetahui hal-hal yang terjadi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

1.9.6. Validasi Data

Data yang telah diperoleh perlu untuk diuji keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan melalui teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* hasil wawancara maupun sumber yang telah diperoleh dari narasumber maupun informan yang kemudian ditanyakan kembali kepada informan lain yang masih berkaitan antara satu sama lain agar nantinya didapat data maupun jawaban yang jelas.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul melalui Teknik pengumpulan data campuran maka data yang diperoleh akan berupa catatan lapangan, foto, video, transkrip wawancara, dokumen yang dikeluarkan badan yang bertanggung jawab serta jurnal. Seluruh data akan dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data interaktif.

1.9.7.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan serta membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan data menjadi menjadi sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal yang dianggap penting serta melihat pola datanya. Setelah dilakukannya reduksi data nantinya akan terlihat gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

1.9.7.2. Penyajian data

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, dimana dalam proses ini disajikan kumpulan info yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Pada proses ini data disajikan dengan cara di klasifikasikan sesuai masalah yang diangkat. Penyajian data juga dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan serta bentuk hubungan antara kategori dan sejenisnya.

1.9.7.3. Kesimpulan

Setelah kedua tahap diatas selesai maka masuk ke tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil susunan narasi serta penyajian data sebelumnya yang memberikan jawaban atas masalah penelitian, sehingga kesimpulan menjadi rinci dan jelas dan menjadikannya sebagai tahap terakhir yang disusun untuk mengetahui hasil dari apa yang telah didapat sebelumnya.